

## Kasus Covid-19 Meningkat, BOR di Tangsel Masih 50%

**TANGSEL (IM)** - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengungkapkan, setelah libur Lebaran 2021 ada peningkatan 3,7% kasus positif Covid-19. Namun, menurut Dinas Kesehatan Kota Tangsel, keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) khusus pasien Covid-19 masih 50%.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel, Alin Hendarlin saat dihubungi media, Selasa (8/7).

"Sampai saat ini BOR bagi pasien Covid-19 di Kota Tangerang Selatan masih ada di angka 50% atau jumlah tempat tidur khusus pasien Covid-19 yang terpakai adalah 312 tempat tidur. Sedangkan tempat tidur intensif care unit (ICU) yang terpakai mencapai 21," ungkap Alin.

Alin menambahkan, Pemkot Tangsel sudah menyiapkan tempat tidur untuk mengatasi peningkatan kasus positif Covid-19.

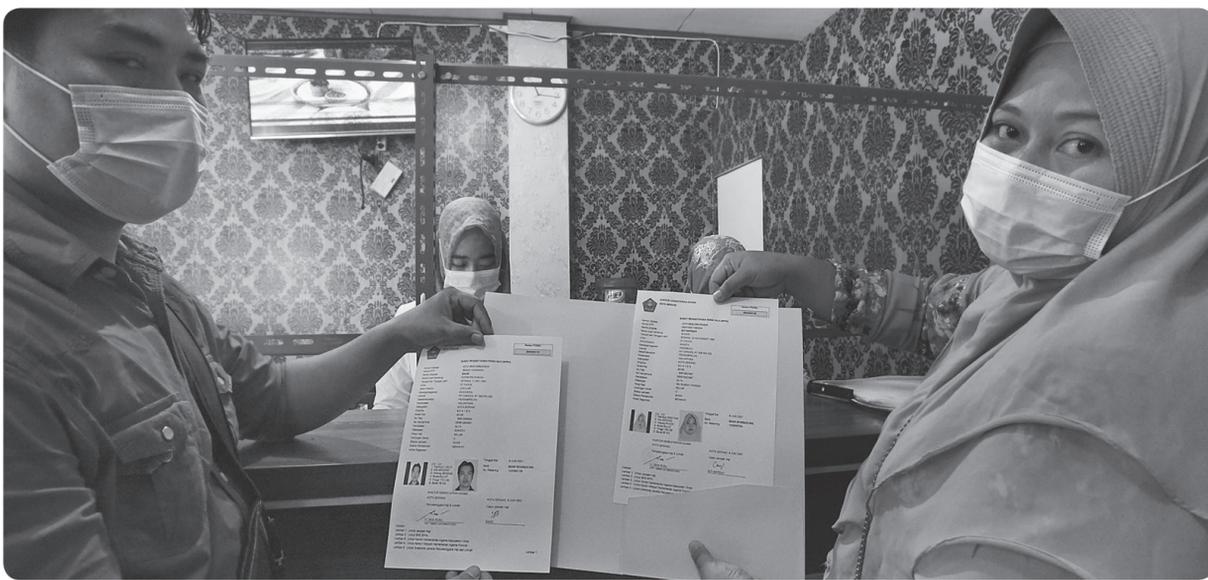
"Kita siapkan 623 tempat tidur untuk pasien Covid-19. Saat ini, masih ada 312 bed lagi. Sementara ICU yang tersedia masih 29 bed. Ini sebagai persiapan

kalau memang terjadi lonjakan kasus pascalibur Lebaran kemarin," lanjutnya.

Alin menyatakan, hingga saat ini, klaster asisten rumah tangga (ART) menjadi penyumbang terbanyak peningkatan kasus Covid-19 di Kota Tangsel. Lantaran para ART yang terkonfirmasi Covid-19 rata-rata baru pulang dari kampung halamannya.

"Berdasarkan data kami ART menjadi klaster terbanyak saat ini yang menghuni rumah lawan Covid-19 yang dimiliki Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Namun bersyukurnya rata-rata kasus yang terkonfirmasi tidak memiliki gejala, jadi hanya dirawat di RLC saja," tandasnya.

Berasarkan data dari website <https://lawancovid19.tangerangselankota.go.id/>, hingga kini kasus Covid-19 di Kota Tangerang Selatan yang terkonfirmasi berjumlah 11.471 orang, sebanyak 10.823 orang di antaranya sudah dinyatakan sembuh, pasien yang dirawat kini berjumlah 248 orang dan meninggal dunia 400 orang. ● pp



### MINAT WARGA MENDAFTAR HAJI TETAP TINGGI

Pasangan suami isteri memperlihatkan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) di Kantor Kemenag Kota Serang, Banten, Selasa (8/6). Menurut petugas meski pemerintah telah mengumumkan pembatalan pemberangkatan haji tahun ini namun minat warga setempat untuk mendaftar haji tetap tinggi dengan kuota antrean hingga 24 tahun ke depan.

# Pemprov Banten Masih Pikir-pikir Laksanakan Pembelajaran Tatap Muka

Mudah-mudahan bulan Juli di Banten kasus Covid-19 terus turun landai bahkan tidak ada. Akan tetapi, jika yang terjadi pada bulan Juli itu terjadi peningkatan kasus dan Kab/Kota masuk zona merah, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten akan terlebih dahulu berkordinasi dengan Satgas Covid-19.

**SERANG (IM)** - Pemrov Banten mengaku masih pikir-pikir untuk melaksanakan

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sekolah tingkat SMA, SMK dan Skh pada tahun

## 11 Ribu Pekerja di Kota Tangerang telah Divaksinasi Covid-19

**TANGERANG (IM)** - Sebanyak 11 ribu pekerja dari sejumlah industri padat karya di Kota Tangerang, telah menerima vaksin Covid-19. Selain jumlah tersebut, terdapat 151 ribu warga Tangerang juga telah mendapat vaksin dari pemerintah.

Wali kota Tangerang, Arief R Wisnansyah mengungkapkan, vaksinasi gotong royong sudah dan terus dilakukan dengan jumlah penerima vaksin sebanyak 11.000 orang dari sejumlah perusahaan yang ada sampai saat ini.

"Terima kasih untuk perusahaan yang sudah berpartisipasi. Ini menjadi wujud perhatian dari perusahaan kepada para pekerjanya, dalam memberikan jaminan kesehatan," kata Arief didampingi Kaprol Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Deonijiu

de Fatima dan Dandim 0506/Tgr, Kolonel Inf Bambang Hery Tugiyono, Selasa (8/6).

Dia mengimbau kepada seluruh industri dan dunia usaha yang ada di Kota Tangerang untuk dapat ikut bergabung dalam pelaksanaan vaksinasi gotong royong bagi para pekerja.

"Ini sebagai salah satu cara untuk menanggulangi pandemi melalui vaksinasi," ungkap Arief. Dijelaskan Arief, untuk wilayah Kota Tangerang sampai saat ini vaksinasi Covid-19 telah diberikan kepada 151 ribu orang dari berbagai golongan penerima vaksin. Mulai dari tenaga kesehatan, pelayanan publik, lansia dan juga vaksin gotong royong bagi pekerja.

"Untuk vaksin lansia, batas usianya turun menjadi minimal 50 tahun dari sebelumnya 60 tahun," ungkap Arief. ● pp

## Tempat Pembuangan Sampah Liar Ditemukan, Kinerja DLH Kota Cilegon Dipertanyakan

**CILEGON (IM)** - Setelah menemukan tumpukan sampah liar di kubangan eks galian pasir di belakang SPBU JLS, Senin (7/6) sore, aktivis lingkungan hidup Supriyadi mempertanyakan kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon.

Menurutnya, meski belum dapat dipastikan lokasi pembuangan sampah liar tersebut masuk pada wilayah Kota Cilegon atau bukan, tetap saja persoalan itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

"Cilegon memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Bagendung, begitu pun Serang di Cilowong. Tetapi, kenapa ada TPA liar di sini. Apakah ini inisiatif warga, atau ada pihak yang bermain," ujar Supriyadi, Selasa (8/6).

Semestinya Pemerintah Daerah (OPD) lebih tanggap dalam hal monitoring dan tindakan ihwal persoalan sampah maupun limbah. Bukan setelah terjadi, lalu kemudian ada tindakan.

Lebih lanjut Supriyadi menduga adanya oknum yang bermain di belakang aktivitas itu. Namun dirinya perlu memastikan terlebih dahulu dengan melakukan investigasi lebih lanjut agar jelas duduk persoalannya.

Aktivis yang konsen menyoroti persoalan lingkungan ini juga menduga banyaknya rekomendasi teknis (Rekomtek) yang dikeluarkan pihak UPTD Pengelolaan sampah ke TPA Bagendung di bawah kendali DLH yang menyebabkan merosotnya, PAD dari sektor retribusi

sampah beberapa tahun belakangan ini.

"Rekomtek ini seharusnya dikaji terlebih dahulu. Kemudian dihitung pajaknya oleh BPKAD, lalu diterbitkan izinnya oleh DP-MTSP" paparnya.

Dengan adanya dugaan Rekomtek bodong dari beberapa UPTD Persampahan di wilayah industri, maka jelas akan banyak oknum yang bermain untuk membuang sampah ke TPA Bagendung hingga menyebabkan Selain itu, Supriyadi juga, menyoroti berbagai kebijakan Kepala DLH Kota Cilegon selama menjabat, mulai dari lemahnya pengawasan terhadap industri, hingga keterlambatan pembayaran honor pegawai yang dianggap berpengaruh pada kinerja petugas kebersihan.

"Kita melihat kinerja DLH tidak memiliki ketegasan utamanya pada pelaku usaha nakal. Padahal banyak peristiwa penting seperti kerap terjadinya ledakan di PT Dover. Belum lagi besarnya potensi pencemaran air, darat dan udara dari industri, tapi selama ini mana action DLH?" jelasnya.

Atas kondisi itu, dirinya akan mengadukan kepada Wali Kota Cilegon ihwal kinerja DLH yang selama ini dinilai meragukan.

Diketahui, lokasi pembuangan sampah liar itu masuk di antara dua wilayah, yakni antara Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber Kota Cilegon dengan Lingkungan Buah Jangkung, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang. ● pra

ajaran baru bulan Juli 2021 mendatang.

Keputusan PTM itu sengaja belum diputuskan, karena sampai saat ini Pemprov Banten masih melihat perkembangan kasus Covid-19 di Provinsi Banten.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Tabrani mengatakan, persoalan PTM ini sebenarnya Dindikbud ingin segera dilaksanakan.

"Tapi persoalannya kami juga harus mengkoordinasi kepada Satgas Covid-19," ujarnya, kemarin.

Tabrani melanjutkan, memang mas Menteri dalam beberapa kesempatan mengatakan PTM akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru Juli mendatang.

"Mudah-mudahan bulan Juli di Banten kasus Covid-19 terus turun landai bahkan ga ada," ungkapnya.

Akan tetapi, tambahnya, jika yang terjadi pada bulan Juli itu terjadi peningkatan kasus dan Kab/Kota masuk zona merah, maka pihaknya akan terlebih dahulu berkordinasi dengan Satgas Covid-19, karena baginya kesehatan masyarakat itu lebih utama.

"Kalau bicara persiapan kami sudah siap dan membangun beberapa Infrastruktur penunjang seperti tempat cuci tangan dengan air mengalir, hand sanitizer, dan termogun. Bahkan siapkan ruang isolasi sesaat," jelasnya.

Dijelaskan Tabrani ruang isolasi sesaat itu digunakan

ketika ada anak masuk ke kelas tiba-tiba batuk terus, nanti dimasukkan ke dalam ruang isolasi sesaat itu.

"Di ruang isolasi sesaat itu nanti akan dicek kembali suhunya, serta dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim medis dari Puskesmas terdekat," ucapnya.

Dikatakan Tabrani, walaupun judulnya PTM sudah dimulai tapi bukan pembelajaran normal semua murid bisa belajar di sekolah, tapi hanya sebagian saja, bergantian.

"Selain itu durasi jam belajar juga dikurangi, jumlah siswa dikurangi, tempat kumpulan kaya kantin ditutup. Lalu kalau orang tua keberatan maka berhak melarang anaknya ke sekolah," pengukasnya. ● pra

### KISRUH DANA BANSOS DI LEBAK

## Anggota Dewan: Ini Modus Pola Korupsi Program Sosial

**LEBAK (IM)** - Terkait temuan dari masyarakat dalam Program Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 yang digelontorkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dari bulan April tahun 2020 hingga saat ini masih berjalan, ramai menuai polemik.

Bantuan berbentuk uang senilai Rp. 600.000, untuk para penerima manfaat (KPM) diberikan pemerintah melalui Kantor Pos di wilayah masing-masing.

Menurut Dede, salah seorang pegawai Kantor Pos dan Giro Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, saat ini BLT tersebut sudah sampai ke tahap 12 dan 13.

Dalam percakapan dengan Dede, kemarin, dijelaskan bahwa data penerima Dana BLT Covid-19 terus bertambah, sehingga terkadang proses cairannya agak terlambat diterima oleh pihak KPM.

"Banyak data KPM baru

yang masuk, dan saat ini untuk tahap 12 dan 13 pencairannya dibarengkan," katanya menjelaskan.

Berbeda dengan penjelasan Dede, NN seorang warga penerima manfaat BLT Covid-19 di Desa Neglasari, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, mengaku bahwa dirinya baru lima kali menerima bantuan tersebut.

"Dari awal saya baru lima kali menerima bantuan covid-19, sebesar Rp600 ribu sebanyak 3 kali dan 300 ribu 2 kali.

**Tidak Boleh Dibelah**

Walau dengan dalih hasil musyawarah, belah semangka Dana Bansos tidak diperbolehkan dan hal itu merupakan bentuk pelanggaran hukum, terlebih dana Bansos bersumber bukan hanya dari APBD, tapi ada juga dari APBD Kabupaten dan APBD Provinsi. Bahkan ada alokasi dana desa, juga PKH, Jamsorot dan lainnya. Ini menurut Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak, Musa Weliannya saat dihubungi awak media, Senin kemarin.

Jadi kalau saya lihat, data hampir 85 persen lebin warga desa tersebut sebagai penerima bantuan sosial walau program sosialnya berbeda satu sama lain. Jadi kalau ada pemotongan dengan dalih untuk pemerataan mengedepankan azas keadilan itu hanya akal-akalan oknum yang berperilaku koruptif, ujar Musa Anggota Dewan dari Fraksi PPP ini. Alasan ini selalu digunakan di hampir semua desa atau wilayah, dengan dalih yang sama, yaitu azas pemerataan dan keadilan.

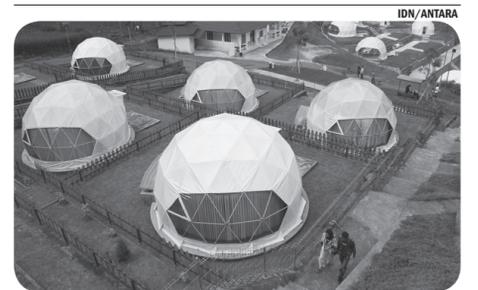
Ini memang modus atau pola korupsi program sosial, program bantuan langsung pada masyarakat, atau program bantuan hibah kepada masyarakat," tandasnya.

Untuk itu, saya mendesak Unit Tipikor Polres Lebak segera melakukan penyelidikan, kata Musa. ● nov



### VAKSINASI COVID-19 BAGI ODGJ

Petugas kesehatan memeriksa kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebelum menyuntikan vaksin Covid-19 AstraZeneca di rumahnya di Periuk, Kota Tangerang, Banten, Selasa (8/6). Pemerintah Kota Tangerang melakukan vaksinasi Covid-19 dari rumah ke rumah bagi ODGJ dan masyarakat berkebutuhan khusus guna mempercepat program vaksinasi.



### DESTINASI WISATA TAHAN GEMPA

Wisatawan berjalan-jalan di samping bangunan penginapan tahan gempa di Lembah Indah Resort, Malang, Jawa Timur, Selasa (8/6). Destinasi wisata di lembah gunung Kawi tersebut diminati karena aman dari gempa serta memiliki area perkemahan dengan lahan pertanian organik dan rumah kaca sehingga bisa dimanfaatkan sebagai wahana wisata edukasi.

## Sekolah Tatap Muka Dibatasi, Cuma Boleh Seminggu Dua Kali

**TANGERANG (IM)** - Pembelajaran tatap muka (PTM) rencananya mulai digelar pada Juli mendatang. Sejumlah daerah termasuk Tangerang sudah menyiapkan mekanisme pelaksanaannya.

Satgas Covid-19 sendiri mengeluarkan aturan PTM dilakukan secara terbatas mulai dari jumlah murid, lamanya kegiatan, hingga waktu pelaksanaan.

Dari segi jumlah, PTM dibatasi maksimal 25 persen dari kapasitas ruang kelas. Kemudian, dari segi waktu, PTM berlangsung paling lama 2 jam selama sehari. Selain itu, kegiatan tersebut hanya boleh berlangsung 2 hari dalam seminggu.

"Pembatasan ini dilakukan demi mencegah penularan virus corona dari aktivitas belajar mengajar tatap muka. Jadi itu sifatnya terbatas," ujar Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Ganip Warsito seperti dilansir Kompas, Selasa (8/6).

Adapun Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito sebelumnya mengatakan, pembukaan sektor pendidikan akan dilakukan secara bertahap tersebut juga

disesuaikan dengan kesiapan masing-masing daerah.

"Perlu diingat bahwa pembukaan sektor pendidikan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah," kata Wiku dalam keterangan pers virtual yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat 4 Juni 2021 lalu.

Dia melanjutkan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Kementerian Agama (Kemenag) telah meluncurkan panduan penyelenggaraan pembelajaran bagi pendidikan anak usia dini di masa pandemi, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di tengah pandemi Covid-19.

Panduan ini merupakan alat bantu bagi guru dan tenaga kependidikan jenjang PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam memudahkan persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas.

"Diharapkan dalam melaksanakan pendidikan tatap muka, panduan tersebut dapat disesuaikan dan dikembangkan berdasarkan kondisi sekolah pada daerah masing-masing," tutur Wiku. pp

## Dindikbud Banten Laksanakan Simulasi dan Evaluasi PPDB 2021

**SERANG (IM)** - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Provinsi Banten melaksanakan simulasi dan evaluasi pelaksanaan Penerima Peserta Didik Baru PPDB tingkat SMA SMK Skh tahun ajaran 2021.

Kegiatan itu diikuti oleh seluruh operator masing-masing sekolah dalam upaya mencegah dan meminimalisir terjadinya kendala teknis pada saat pelaksanaan PPDB.

Ketua pelaksana PPDB Provinsi Banten Taqwm pada saat memberikan materi evaluasi di SMKN 1 Kota Serang mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari agenda sosialisasi yang terus dilakukan sampai hari pelaksanaan tiba.

"Karena nanti para operator ini yang akan menangani langsung di lapangan, makanya kami berikan pembekalan dulu lewat simulasi yang kemudian langsung dievaluasi," ujarnya, Selasa (8/6).

Dari hasil evaluasi itu, lanjut Taqwm, kemudian menjadi bahan untuk penyempurnaan sistem yang digunakan, bagaimana kesiapan mereka ada kendala apa saja yang dialami.

"Karena aplikasi ini kan juga harus dipahami oleh temen-temen di sekolah," ucapnya.

Saat ini, tambah Taqwm, pihaknya sedang melakukan kegiatan simulasi dan evaluasi untuk sekolah SMK yang berada di daerah Serang dan Cilegon dengan total sekolah sebanyak 23 sekolah.

"Nanti kami akan terus roadshow ke Lebak dan Pandeglang juga. Kemudian jika sudah semua, kami akan ke sekolah yang berada di pedalaman untuk memastikan kesiapan infrastruktur perangkat penunjang pelaksanaan PPDB," jelasnya. Taqwm menambahkan, untuk jumlah operator setiap sekolah sebanyak lima orang, namun yang mengikuti kegiatan simulasi dan evaluasi ini hanya dua orang.

"Nanti dari dua orang ini mereka akan mengajarkan rekan-rekannya yang lain di sekolahnya masing-masing," katanya.

Sedangkan untuk di sekolah SMK, Taqwm berharap bisa memberdayakan SDM lebih banyak untuk diberdayakan sebagai operator, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih lebih maksimal.

"Di SMK itu kan yang jago-jago IT banyak, makanya kami sih harapannya lebih banyak lagi yang diberdayakan menjadi operator PPDB," harapnya. ● pra